

Penerapan New Public Management di Pendidikan Tinggi Studi Kasus di STIA & P Annisa Dwi Salfaritz Palembang

A Rizal Fahlevi¹⁾, Evi Satispi²⁾

^{1), 2)}Program Doktor Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih, Jakarta
Email Koresponden : arizfasemsi60@gmail.com

ABSTRACT

New Public Management offers a different perspective to improve public sector performance by adopting the work spirit of the private sector which prioritizes the values of efficiency and effectiveness. This problem gave rise to the idea of how to implement new public management in higher education by taking a case study at the Annisa Dwi Salfarizi College of Administration and Government in Palembang. This research aims to determine the application of new public management in higher education, especially at the Annisa Dwi Salfarizi College of Administration and Government, Palembang. The method used in this research is research with a qualitative approach, namely building arguments to obtain and sort data as well as interpret and conclude data findings. The data in this research was collected through observation and interviews. The results of the research were that the Annisa Dwi Salfarizi Palembang College of Administration and Government carried out face-to-face lectures using power points, tuition payments were still made manually, and KRS was filled out in writing rather than using an integrated system. Academic activity information services are announced through information posted on the notice board, so students must always check the notice board regularly and must come to campus if they want to find out information about lectures. Conclusion: The implementation of New Public Management in Higher Education using case studies at the Annisa Dwi Salfarizi College of Administration and Government in Palembang does not appear to have been implemented optimally.

Keywords: Application, Public Management, New Public Management, Higher Education

ABSTRAK

New Public Management menawarkan perspektif berbeda untuk meningkatkan kinerja sektor publik dengan mengadopsi semangat kerja sektor swasta yang mengedepankan nilai efisiensi dan efektivitas. Permasalahan tersebut memunculkan ide bagaimana penerapan New Public Management pada perguruan tinggi dengan mengambil studi kasus di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi di Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan New Public Management pada perguruan tinggi khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu membangun argumen untuk memperoleh dan memilah data serta menafsirkan dan menyimpulkan temuan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang melaksanakan perkuliahan tatap muka dengan menggunakan power point, pembayaran SPP masih dilakukan secara manual, dan KRS diisi secara tertulis dan tidak menggunakan sistem yang terintegrasi. sistem pelayanan informasi kegiatan akademik diumumkan melalui informasi yang dipasang pada papan pengumuman, sehingga mahasiswa harus selalu mengecek papan pengumuman tersebut secara berkala dan harus datang ke kampus jika ingin mengetahui informasi mengenai perkuliahan. Kesimpulan: Penerapan New Public Management pada Perguruan Tinggi dengan menggunakan studi kasus pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang tampaknya belum terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci : Penerapan, Manajemen Publik, New Public Management, Pendidikan Tinggi

1. Pendahuluan

Governance merupakan isu kontekstual dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini sejalan dengan dampak pergerakan pemerintahan di negara demokratis menuju tata kelola pemerintahan yang baik, serta semakin berkembangnya pengetahuan masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, intelektual, dan teknologi kinerja agar lebih terbuka dan akuntabel menjadi salah satu permintaannya (Riwukore, Habaora, & Terttiaavini, 2022). *Good governance* merupakan perkembangan terkini dalam administrasi publik pada paradigma kelima. Perubahan paradigma merupakan hasil dari tuntutan masyarakat, karena masyarakat sudah muak dengan aparaturnya negara yang lamban, mahal, dan korup, serta kurangnya sumber daya manusia yang jujur dan pemborosan anggaran.

Revolusi administrasi publik pada akhir tahun 1970an ditandai tidak hanya oleh perubahan dalam layanan sosial dan praktik pengadaan publik dalam struktur pemerintahan. Pergeseran menuju marketing, atau menempatkan kaidah dan penerapan manajemen bisnis dalam administrasi pelayanan publik, kemudian disebut, dalam istilah ahli, New Public Management (NPM). 'government' sering dirujuk secara bersamaan dengan NPM. Di Indonesia government diartikan sebagai tata kelola. Tata kelola adalah tentang penciptaan strategi umum dan struktur pemerintahan secara keseluruhan. NPM, bagaimanapun, adalah sebuah aspek operasional dari model administrasi publik yang benar-benar baru (Ewalt & Jo, 2001). Banyak pandangan para sarjana menanggapi New Public Management (NPM) sebagai Paradigma yang mengadopsi metode dan teknik dari pemerintahan di seluruh dunia. NPM mengubah secara drastis peran negara, terutama dalam hal interaksi pemerintah dengan masyarakat. Perubahan ini menimbulkan dampak serius dalam manajemen sektor publik yang bersifat fleksibel (Mahmudi, 2003). Pergeseran manajemen ini diharapkan mampu menjadi panduan pelaksanaan manajemen pemerintahan kearah lebih baik.

NPM sebagai fenomena baru secara cepat menyebar keseluruh dunia sehingga mempengaruhi kebijakan pemerintah baik pemerintahan di negara maju maupun pemerintahan di negara berkembang. Dampak perubahan tersebut juga mengubah dunia pendidikan. Pada abad ke 20, dunia Pendidikan terutama pendidikan tinggi biasanya diintervensi oleh negara. Hal ini dikarenakan pendidikan dan penelitian dianggap sebagai barang publik sehingga penggunaan kebijakan dan instrumennya ditentukan oleh otoritas publik. New Public Management (NPM) dan desentralisasi pendidikan berpengaruh signifikan terhadap proses pengambilan keputusan di perguruan tinggi dengan cara meningkatkan otonomi lembaga pendidikan tinggi.

Sektor publik di banyak negara di seluruh dunia telah terkena dampak signifikan dari New Public Management. Dampaknya menghasilkan restrukturisasi menyeluruh terhadap seluruh sistem pelayanan publik, termasuk sistem pendidikan. Modifikasi ini menuai pujian dan kritik. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai dampak New Public Management terhadap sistem pendidikan di seluruh dunia, penting untuk memberikan konsep dasar yang mendasari konsep tersebut serta contoh nyata bagaimana adaptasi dilaksanakannya di berbagai negara. Sejak tahun 1990an perdebatan di Eropa dan Amerika mengenai modernisasi dan peningkatan efisiensi sektor publik semakin terlihat, namun administrasi publik sering kali bermasalah dengan rendahnya efisiensi dan maraknya korupsi di sektor publik sehingga menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap administrasi publik.

Di dunia pendidikan paradigma NPM menciptakan persaingan antar perguruan tinggi yang didorong oleh kepentingan pasar, insentif berbasis hasil antara perguruan tinggi dan dosen, serta layanan pendidikan yang lebih berorientasi pada tuntutan keluarga. Sesuai dengan teori administrasi publik, paradigma New Public Management berpandangan bahwa proses hubungan transaksi yang "dimainkan" dalam dunia bisnis dianalogikan dengan sistem tata kelola hubungan antara unit atau unit lembaga pemerintah dengan pengguna jasanya (pelanggan) (Denhardt & Denhardt, 2007). Anjuran transformasi kinerja sektor swasta menjadi kinerja sektor publik ini diharapkan mampu menggantikan atau mereformasi kinerja sektor publik saat ini, yang berdasarkan prosedur dan aturan yang bertumpu pada kewenangan pejabat atau atasan, serta menggerakkannya menuju kepuasan pelanggan di mana persaingan yang sehat didorong.

Penerapan kebijakan NPM di pendidikan tinggi seringkali menghasilkan perubahan signifikan terhadap tata kelola dan budaya organisasi. Meskipun meningkatkan kinerja dan efisiensi adalah tujuan utama, terdapat kelemahan dalam penggunaan NPM, termasuk tingkat stres yang lebih tinggi. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi harus secara hati-hati menilai bagaimana menerapkan prinsip-prinsip NPM sambil mempertahankan cita-cita dasar pendidikan dan tujuan sosialnya. Berdasarkan temuan tersebut maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan New Public Management Pada Pendidikan Tinggi dengan Studi Kasus Di STIA & Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritzhi Palembang?

Perubahan demografi, pertumbuhan ekonomi yang lamban, dan meningkatnya tekanan persaingan akibat globalisasi telah menyebabkan sejumlah penyesuaian terhadap sistem pendidikan tinggi saat ini. Dengan tumbuhnya New Public Management, institusi pendidikan tinggi dalam negeri semakin dihadapkan pada pandangan yang berlawanan mengenai bagaimana sistem universitas dan institusi pendidikan tinggi yang harus dikontrol (Krücken, Kosmützky, & Torka, 2021; Olsen, 2015; Vaira, 2004). Namun, sistem pendidikan tinggi di setiap negara masih terikat oleh kerangka peraturan dan koordinatifnya masing-masing, yang pada dasarnya merupakan cerminan dari proses kelembagaan dan sejarahnya (Neave, 2003). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembuat kebijakan pendidikan nasional menciptakan dan melaksanakan model tata kelola baru dan sering mengubah masing-masing institusi

pendidikan tinggi, peran negara, kondisi sosio-ekonomi, dan tujuan pendidikan tinggi, semuanya dalam menghadapi seruan agar universitas “do more with less” (Gornitzka & Maassen, 2000).

Ada beberapa relevansi NPM dengan perguruan tinggi yang dapat ditinjau, yakni sebagai berikut.

1. NPM mendukung implementasi desentralisasi pendidikan tinggi dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada institusi akademik, seperti fakultas dan/atau program studi. Kemandirian ini dapat mencakup perekrutan dosen dan mahasiswa, penanganan keuangan unit, dan pengambilan keputusan lainnya.

2. Kinerja dan akuntabilitas perguruan tinggi dapat diukur dengan NPM. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur kualitas penelitian, pengajaran, dan kerja sukarela. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan berupaya mencapai tujuannya.

3. Perguruan tinggi bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya dari sumber luar, mahasiswa, pendanaan penelitian, dan peluang pengabdian masyarakat. Inovasi dan kualitas dapat meningkat akibat persaingan ini.

4. NPM mempromosikan penggunaan insentif dan sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan output dan mencapai tujuan. Hal ini dapat melibatkan penggunaan program insentif di pendidikan tinggi untuk memberi penghargaan kepada dosen yang memenuhi tujuan yang telah ditentukan untuk penelitian dan hasil pengajaran mereka.

5. NPM mempromosikan lingkungan yang berfokus pada pelanggan di perguruan tinggi. Dalam hal ini, hal ini melibatkan komunikasi dengan dunia usaha, mendengarkan masukan siswa mengenai penawaran pendidikan, dan mengenali kebutuhan masyarakat setempat.

6. Perguruan tinggi sering kali menangani keuangan mereka dengan lebih efektif dan transparan. Hal ini mencakup prosedur seperti pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan distribusi sumber daya berdasarkan kinerja.

7. Perguruan tinggi yang mengadopsi NPM meningkatkan penggunaan teknologi dalam penelitian dan pengajaran untuk meningkatkan efisiensi.

Menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald, dan Pettgrew (Keban, 2004), orientasi manajemen publik baru ini telah beberapa kali berubah, yaitu Orientasi The Drive, Orientasi Downsizing and Decentralization, Orientasi in Search of Excellence, Orientasi Public Service.

2. Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan New Public Management Pada Pendidikan Tinggi dengan Studi Kasus Di STIA & Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang. Manfaat teoritik adalah Kajian mengenai penerapan NPM di perguruan tinggi dapat memberikan tinjauan teoritis dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya mengenai bagaimana prinsip-prinsip NPM dapat diterapkan dan berdampak di

perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan teknik kualitatif, yang mendefinisikan bahwa realitas bersifat subjektif, seperti yang dipandang oleh peneliti dan informan. Ada dua hal yang dilakukan oleh dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, yakni membangun argumen untuk memperoleh dan memilah data dan menafsirkan serta menyimpulkan temuan data tersebut. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Metode observasi dilakukan dengan metode observasi langsung. Metode observasi langsung ini bersifat umum. Ini artinya bahwa pengamatan dilakukan terhadap lingkup yang luas dan informan yang lebih banyak. Ada beberapa komponen atau tahapan untuk menganalisis data kualitatif menggunakan model dari (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

3. Pembahasan

Dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi publik, semua negara OECD telah melakukan reformasi sektor publik selama sepuluh tahun terakhir (Pollitt & Bouckaert, 2000). Secara luas, reformasi ini juga diterapkan di bidang pendidikan tinggi (Dobbins, Knill, & Maria, 2016). Secara teoritis, sebagian besar reformasi yang dilaksanakan di negara-negara OECD berada di bawah payung New Public Management (NPM), yang memberikan penekanan kuat pada akuntabilitas sektor publik yang berorientasi pada hasil (Hood, 1995a). Aliran pemikiran New Public Management berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara manajemen sektor publik dan swasta. Penting untuk dicatat bahwa terdapat banyak penelitian mengenai transformasi di sektor publik dan sejumlah besar literatur mengenai hal ini. Pada pembahasan ini hanya karya yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini yang akan ditinjau; sisanya akan diabaikan.

Landasan untuk mengubah sistem pemerintahan yang kaku, birokratis, dan terstruktur secara hierarki diletakkan oleh New Public Management (Bryson, Crosby, & Bloomberg, 2014; Hood, 1991, 1995b; Hood, Rothstein, & Baldwin, 2001; Pollitt & Bouckaert, 2000). New Public Management telah disebut sebagai paradigma dalam bidang administrasi publik sejak pertama kali muncul, menghasilkan perubahan dalam administrasi publik konvensional (Bryson et al., 2014). Dalam upaya untuk mengatasi kekurangan administrasi publik yang konvensional dan ketinggalan jaman, New Public Management telah berhasil mendapatkan banyak daya tarik sebagai model (Hood, 1991). Mewujudkan banyak aspek perubahan dalam pergeseran permintaan, harapan pelanggan, dan tuntutan pasar global dan kompetitif adalah tujuan akhir dari New Public Management. Motivasi utama di balik integrasi prinsip-prinsip daya saing dan logika manajemen sektor swasta dalam pendekatan New Public Management adalah pengurangan biaya, untuk mencapai hal ini (Hood, 1991, 1995b; Hood et al., 2001).

Perguruan tinggi merupakan salah satu sektor publik. Sebagai institusi publik, pendidikan tinggi tidak hanya

menjawab kebutuhan pendidikan negara tetapi juga memikul tanggung jawab untuk memajukan penelitian dan teknologi yang dapat diterapkan pada masyarakat yang lebih baik. Peran perguruan tinggi inilah yang menjadikannya sebagai institusi yang memerlukan administrasi yang baik dan tanggung jawab yang tepat.

Pada tahun 1980an, perubahan dalam interaksi negara dengan masyarakat, yang sebagian digagas oleh NPM, memberikan tekanan pada pendidikan tinggi untuk menjadi lebih produktif dan efisien. Menurut Capano dan Pritoni (2019) pemerintah di benua Eropa telah mengubah kebijakan pendidikan tinggi selama 30 tahun terakhir untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan tinggi. Menurut Olsen (2009), Modernisasi Pendidikan Tinggi sering dilihat sebagai proses reformasi yang melibatkan pelaku yang bertindak lebih mandiri dan melalui organisasi dan agennya untuk menentukan tujuan dan sasaran kinerja Pendidikan Tinggi. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi di Palembang, juga mengalami perubahan tersebut.

Orientasi The Drive

Tujuan efisiensi adalah drive, yaitu arah pengelolaan publik yang baru. Model yang paling awal muncul adalah model yang pertama. Anggapan mendasarnya adalah bahwa birokrasi tidak efisien, rumit, dan berkinerja buruk. 'Efisiensi' adalah kekuatan pendorong di balik upaya untuk menjadikan birokrasi lebih berpenampilan bisnis. Berikan nilai efisiensi sebagai prioritas utama saat mengukur kinerja. Penjelasan ini menyebabkan banyak penyesuaian yang dilakukan oleh STIA dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang, salah satunya adalah pengelolaan data akademik dan kemahasiswaan yang lebih cepat dan akurat. Pekerjaan administratif dapat dipermudah dengan beralih dari pemrosesan manual ke sistem terintegrasi untuk mempercepat dan mengefektifkan pelaksanaan proses pengajaran di kampus.

Orientasi Downsizing and Decentralization

Meski memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, perguruan tinggi swasta dan negeri mempunyai peran yang sama pentingnya dalam masyarakat. Indikator utama mutu pendidikan tinggi bukanlah status kepemilikan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Banyak faktor, seperti yang digunakan oleh Quacquarelli Symonds (QS) Stars University Ratings, atau lembaga pemeringkat "QS Stars", yang menentukan kualitas pendidikan tinggi. Faktor-faktor tersebut meliputi spesialisasi, penelitian dan internasionalisasi, karir lulusan, kualitas pengajaran, dan kualitas lingkungan belajar. Perguruan tinggi terkemuka berhak menjadi negeri dan swasta. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk memperlakukan perguruan tinggi swasta dan negeri secara setara, perguruan tinggi swasta seringkali masih perlu menerapkan otonomi yang lebih besar dalam hal permodalan, kolaborasi, manajemen institusi, dan perekrutan mahasiswa. Menjalankan perguruan tinggi swasta mirip dengan menjalankan bisnis swasta yang

mandiri. Pengelolaan pendidikan tinggi harus dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber daya manusianya. Tentu saja, perguruan tinggi swasta pasti akan termasuk dalam lingkup yayasan jika mereka menjadikan tujuan akademik nirlaba sebagai prioritas utama mereka. Yayasan adalah organisasi bisnis yang mempunyai tujuan nirlaba. Bukan hanya pejabat universitas dan fakultas, tetapi juga yayasan yang membawahi lembaga tersebut, akan menentukan baik atau tidaknya sebuah perguruan tinggi swasta dikelola. Berhasil tidaknya restrukturisasi ditentukan oleh sinergi finansial dan motivasi.

Desentralisasi dan perampingan adalah dua aspek restrukturisasi. Dengan menyederhanakan organisasi, desentralisasi dan perampingan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan beradaptasi. sebuah gerakan untuk melawan birokrasi yang masif dalam organisasi-organisasi yang terintegrasi secara vertikal dengan mengurangi standarisasi yang tinggi, meningkatkan desentralisasi pengelolaan anggaran dan tanggung jawab strategis, meningkatkan jumlah kontrak, dan membagi yang strategis (pembuatan kebijakan) dari operasional (pembuatan sesuatu). Pengucapan manajemen berdasarkan kontrak dibandingkan dengan manajemen berdasarkan hierarki merupakan nama lain dari model kedua (Ferlie, Ashburner, Fitzgerald, & Pettigrew, 1996). Agar unit-unit yang lebih kecil dapat beroperasi secara efisien dan akurat, orientasi ini menempatkan prioritas tinggi pada perampingan struktur, peningkatan fungsi, dan pemberian wewenang kepada mereka.

Dengan menyederhanakan struktur organisasi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang menggunakan NPM. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan memungkinkan dosen lebih mudah beradaptasi. Menghemat dan mengendalikan pengeluaran anggaran adalah tujuan penyederhanaan organisasi. Seorang ketua membawahi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang. Ketua dibantu tiga wakil yaitu Wakil Ketua I bidang Akademik, Wakil Ketua II bidang Keuangan dan Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan. Tugas Wakil Ketua I bertanggung jawab atas kurikulum dan akademik. Wakil Ketua I dibantu oleh dua Kepala Program Studi dan BAAK. Wakil ketua II membidangi Keuangan dan subbagian yang membantu wakil Ketua II adalah Bagian BAU, Tata Usaha dan Bagian Perlengkapan. Wakil Ketua III membidangi Kemahasiswaan yang membantu bagian ini adalah Humas dan bertanggung jawab terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa. Rampingnya struktur organisasi ini membawa keuntungan bagi yayasan karena anggaran menjadi lebih hemat.

Orientasi in Search of Excellence

Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pengalaman manusia. Rahasia untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, bermoral, dan berbakat adalah memiliki sistem pendidikan yang unggul dan terlaksana dengan baik. Dengan demikian, masyarakat

dapat melahirkan peradaban yang lebih tinggi dan maju melalui pendidikan. Teknologi mengajarkan banyak hal kepada manusia dalam kehidupan, termasuk pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji kemajuan teknologi yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dilepaskan dari kemajuan pembangunan global. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai banyak manfaat, dan bentuknya bermacam-macam. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, salah satu bidang ilmu pengetahuan yang harus dikuasai adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah menunjukkan bahwa kemampuan suatu negara untuk maju ditentukan oleh kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Meskipun menemukan jawaban atas masalah adalah tujuan teknologi, menjawab pertanyaan adalah tujuan sains.

Peningkatan akses sekaligus peningkatan kualitas dan relevansi masih menjadi fokus utama pendidikan tinggi di Indonesia hingga saat ini. Keinginan untuk mengenyam pendidikan tinggi masih sangat terasa dalam kehidupan masyarakat. Sumber daya manusia yang dihasilkan dari pendidikan tinggi yang berkualitas rendah tidak akan berdaya saing karena kurangnya kompetensi. Sementara itu, kesenjangan antara supply dan demand akan semakin besar jika pendidikan tinggi tidak relevan dengan pembangunan, tuntutan masyarakat, atau dunia kerja. Perguruan tinggi harus melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan di masa depan yang semakin bergantung pada ilmu pengetahuan dan inovasi, serta memperkuat kemandirian nasional. Melihat permasalahan tersebut, perguruan tinggi dan pendidikan tinggi di Indonesia harus melakukan reorientasi dan perubahan untuk mengembangkan sistem yang mampu mengatasi permasalahan tersebut guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul serta mewujudkan kedaulatan dan peradaban nasional yang terhormat. Masyarakat Indonesia mudah beradaptasi, berdaya cipta, berdaya saing, dan bertakwa. Individu sejahtera yang mempertahankan identitas nasionalnya sambil mempertahankan sudut pandang global dianggap sebagai warga global.

Berdasarkan data statistik terkini pada tahun 2022 yang dikeluarkan Direktorat Diseminasi Statistik (2023), terdapat 3.107 perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 2.982 perguruan tinggi swasta dan 125 perguruan tinggi negeri. Sedangkan total lembaga yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) berjumlah 897, terdiri dari 59 perguruan tinggi dan 838 perguruan tinggi swasta.

Informasi ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi swasta mendominasi pendidikan tinggi di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang membantu Wilayah Kota Palembang mengembangkan basis sumber daya manusianya. Hal ini tercantum dalam Visi yang berbunyi

Mewujudkan Sekolah Tinggi yang Unggul dan Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Profesional, dan Kompetitif pada Level Nasional di bidang Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Pemerintahan Tahun 2030. Pengoperasionalan dari visi tersebut dengan cara menjalankan misi berupa: a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam bidang Administrasi Publik dan Pemerintahan yang Adaptif dengan Perkembangan IPTEK dan dunia kerja; b) Menerapkan mekanisme pengelolaan Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Pemerintahan berbasis penjaminan mutu; c) Menjalani dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait. Seperti diketahui, dalam era globalisasi modern sekarang ini, perkembangan teknologi dapat diterapkan di dunia Pendidikan. Teknologi yang serba canggi mampu untuk membuat proses pembelajaran yang disampaikan menjadi lebih cepat dan lancar. Pemakaian dari teknologi terbukti juga mampu meningkatkan minat belajar para peserta didik karena mempunyai tampilan yang lebih menarik sehingga membuat proses belajar menjadi lebih berwarna dan tidak membuat jenuh. Namun sayangnya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang belum menggunakan kecanggihan teknologi dalam proses ajar mengajar. Perguruan tinggi ini belum memiliki sistem pembelajaran E-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Mahasiswa dapat mengakses materi pelajaran baik itu berupa video, gambar, teks ataupun suara dimana saja tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. sistem seperti ini tentu saja dimiliki oleh Universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi merupakan perguruan tinggi yang masih merintis dan berada dibawah pengelolaan sebuah yayasan yang dana operasional pembelajaran dari hasil pembayaran mahasiswa di setiap semesternya. Hal ini yang membuat perguruan tinggi ini sulit menerapkan sistem E-learning.

Orientasi Public Service

Model New Public Management keempat adalah orientasi pelayanan publik. Model ini mengingatkan kita pada Total Quality Management di sektor publik dan kepedulian terhadap pengguna layanan publik. Lebih lanjut, model terakhir ini menginginkan kembalinya kekuasaan dari badan-badan lokal yang ditunjuk, serta skeptisisme terhadap peran pasar dalam penyediaan layanan publik (Ferlie et al., 1996). Menurut Pasciana, Iriany, dan Muhtadi (2024) Sumber daya manusia atau petugas layanan yang profesional di bidangnya mungkin berfungsi sebagai faktor pendukung untuk menampung keluhan konsumen.

Pada hakikatnya para ahli menciptakan Model NPM (New Public Management) dalam upaya menjawab kekhawatiran akan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam birokrasi yang cenderung tidak efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain

karena pola kerja yang masih tradisional. , ketinggalan jaman, sehingga tidak mampu mengakomodasi perubahan lingkungan yang serba cepat. Model NPM memberikan strategi manajerial yang dapat disesuaikan dengan beragam perkembangan, memastikan bahwa berbagai layanan kepada masyarakat diberikan sesuai dengan yang diharapkan. Konsep ini bertujuan untuk memadukan ide-ide manajemen sektor publik dan swasta. Penggabungan ini dilakukan dengan menetapkan tujuan, memastikan bahwa pengguna memberikan perhatian yang lebih besar dalam penyediaan layanan dan memberikan energi kembali kepada para manajer sektor publik dengan menetapkan misi layanan yang beragam, namun tetap sesuai dengan gagasan yang diterima mengenai manajemen berkualitas tinggi yang berasal dari praktik baik yang dapat dialihkan di sektor swasta. Dengan demikian, NPM menekankan profesionalisme, misi, dan nilai-nilai yang harus dicapai organisasi publik, serta aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi “pengguna” dan anggota masyarakat, termasuk perwakilannya, menekankan “pembelajaran sosial” dalam penyampaian layanan publik dan berkelanjutan. evaluasi kinerja, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.

Kualitas layanan akan menentukan kinerja kompetitif suatu perguruan tinggi, dan keunggulan kompetensi antar perguruan tinggi di masa depan akan dinilai dari tingkat layanan yang diberikan di luar kelas. Kualitas pengajaran seorang dosen, sudah menjadi kebutuhan sebagai pelayanan di dalam kelas, Namun demikian, kualitas layanan di luar kelas, juga sangat penting untuk diperhatikan sebagai bentuk dukungan pada pelayanan prima di perguruan tinggi seperti layanan informasi akademik, layanan kemahasiswaan, dan layanan terkait lainnya, Faktanya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa diantaranya pengelolaan administrasi akademik masih bersifat manual, padahal di era digitalisasi ini banyak kampus telah menerapkan sistem pengelolaan akademik menggunakan sistem yang terintegrasi, sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang melakukan aktivitas perkuliahan dengan cara tatap muka dengan menggunakan power point, pembayaran SPP masih membayar secara manual dan pengisian KRS dengan cara ditulis tidak memilih melalui sistem yang terintegrasi. Layanan informasi kegiatan akademik diumumkan melalui informasi yang ditempelkan ke papan pengumuman sehingga mahasiswa harus senantiasa mengecek papan pengumuman secara berkala dan harus datang ke kampus jika ingin mengetahui informasi tentang perkuliahan. Walaupun banyak keterbatasan namun mahasiswa tetap semangat untuk menjalani aktivitas perkuliahan, hal ini dikarenakan staff dan dosen pengajar yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang ramah, bersahabat dan bersifat kekeluargaan sehingga mahasiswa merasa nyaman melakukan proses pembelajaran di kampus.

4. Kesimpulan

Penerapan New Public Management di Perguruan Tinggi dengan studi kasus di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang terlihat belum optimal diterapkan, hal ini terlihat dari segi orientasi the drive belum dapat mendorong penggunaan sistem terintegrasi baik itu layanan akademik maupun layanan informasi. Kedua layanan penting ini masih diselenggarakan dengan cara manual, namun dengan segala keterbatasannya, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang memiliki staff dan dosen-dosen yang ramah, bersahabat dan penuh kekeluargaan, sikap ini membuat mahasiswa nyaman melakukan proses pembelajaran di kampus. Keterbatasan ini membuat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang bertekad untuk memperbaiki segala kekurangan dengan cara lebih fokus mewujudkan visi dan misi lembaga agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang Berkarakter, Profesional, dan Kompetitif pada Level Nasional di bidang Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Pemerintahan Tahun 2030.

Daftar Pustaka

- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Capano, G., & Pritoni, A. (2019). Varieties of hybrid systemic governance in European Higher Education. *Higher Education Quarterly*, 73(1), 10–28. <https://doi.org/10.1111/hequ.12180>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (Expanded E). M.E.Sharpe.
- Dobbins, M., Knill, C., & Maria, E. (2016). *An analytical framework for the cross-country comparison of higher education governance* Author (s): Michael Dobbins , Christoph Knill and Eva Maria Vögtle Published by: Springer Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/41477894> Accessed : 14-07-2016 22. 62(5), 665–683.
- Ewalt, & Jo, A. (2001). Theories of governance and New Public Management: Links to Understanding Welfare Policy Implementation. *The Annual Conference of the American Society for Public Administration*.
- Ferlie, E., Ashburner, L., Fitzgerald, L., & Pettigrew, A. (1996). *The New Public Management in Action*. Oxford University Press.
- Gornitzka, Å., & Maassen, P. (2000). National policies concerning the economic role of higher education. *Higher Education Policy*, 13(3), 225–230. [https://doi.org/10.1016/S0952-8733\(00\)00009-X](https://doi.org/10.1016/S0952-8733(00)00009-X)
- Hood, C. (1991). Public Administration For All Season? *Public Administration*, 69(1), 3–19.

- Hood, C. (1995a). Contemporary public management: A new global paradigm? *Public Policy and Administration*, 10(2), 104–117. <https://doi.org/10.1177/095207679501000208>
- Hood, C. (1995b). The “new public management” in the 1980s: Variations on a theme. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2–3), 93–109. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(93\)E0001-W](https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0001-W)
- Hood, C., Rothstein, H., & Baldwin, R. (2001). *The Government of Risk*. New York: Oxford University Press.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: konsep, teori dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Krücken, G., Kosmützky, A., & Torca, M. (2021). Towards a Multiversity? Universities between Global Trends and National Traditions. In *Towards a Multiversity?* <https://doi.org/10.1515/9783839404683-001>
- Mahmudi, M. (2003). New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. *Sinergi*, 6(1), 69–76. <https://doi.org/10.20885/sinergi.vol6.iss1.art5>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 ed.). Sage Publication.
- Neave, G. (2003). The Bologna declaration: Some of the historic dilemmas posed by the reconstruction of the community in Europe’s systems of higher education. *Educational Policy*, 17(1), 141–164. <https://doi.org/10.1177/0895904802239290>
- Olsen, J. P. (2009). Democratic government, institutional autonomy and the dynamics of change. *West European Politics*, 32(3), 439–465. <https://doi.org/10.1080/01402380902779048>
- Olsen, J. P. (2015). *of the (European) University*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5971-1>
- Pasciana, R., Iriany, I. S., & Muhtadi, A. H. (2024). Efektivitas Pelayanan Berbasis Online Sistem Antrian Terpadu (SISTER) di Plasa Telkom Garut. *Jurnal pemerintahan dan politik Universitas Indo Global Mandiri*, 9(1), 50–57. <https://doi.org/https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/3722>
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2000). *Public Management Reform A Comparative Analisis*. New York: Oxford University Press.
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>
- Vaira, M. (2004). Globalization and Higher Education Organizational Change: A Framework for Analysis Globalization and higher education organizational change: A framework for analysis * 1 . Introduction: The problem of higher education organizational in change a globaliz. *Higher Education*, 48(4), 483–510.